



eISSN 3032-601X & pISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3, 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3, 2024

Pages: 433-441

Analisis Pemerintah dalam Pembangunan Nasional dalam Konteks Infrastruktur di Kota Serang

Alita Harya Afrilian, Eli Apud Saepudin, Netti Selfiana, Adela Marviola Navyyaandhini, Nova
Qurrota A'yun, Della Puspita Sari

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina
Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1614>

How to Cite this Article

APA : Afrilian, A. H., Saepudin, E. A., Selfiana, N., Navyyaandhini, A. M., A'yun, N. Q., & Puspita Sari, D. (2024). ANALISIS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KONTEKS INFRASTRUKTUR DI KOTA SERANG. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 433 - 441. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3.1614>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Pemerintah dalam Pembangunan Nasional dalam Konteks Infrastruktur di Kota Serang

Alita Harya Afrilian¹, Eli Apud Saepudin², Netti Selfiana^{3*}, Adela Marviola Navyyaandhini⁴, Nova Qurrota A'yun⁵, Della Puspita Sari⁶

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

Email:

litharya12@gmail.com¹, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², selfiananetty@gmail.com^{3*}, marviolaadela@gmail.com⁴, novaqrtaa@gmail.com⁵, dellapuspitasarisari70@gmail.com⁶

Diterima: 15-05-2024 | Disetujui: 17-05-2024 | Diterbitkan: 18-05-2024

ABSTRACT

Infrastructure development has a vital role in fulfilling people's basic rights. Infrastructure or facilities and infrastructure have a very strong relationship with social welfare and environmental quality as well as the process of economic growth of a region or area. Infrastructure development in Serang City has a very impactful role because it affects all sectors, but in the observations made there is still a lot of infrastructure that needs to be improved again because it can interfere with community activities, so it needs to be handled further by the local government so that it continues to always provide maximum service to the community and can improve the quality of infrastructure so that it can be used safely. In addition, it is still found in some areas that are still flooded if there is high intensity rainfall. because there are still many national development issues in the city of Serang, it is necessary to make very significant changes for the government to travel frequently in that direction, and it is hoped that the government can quickly deal with how to manage buildings because there are still many developments that are still unfinished in the process, This article aims to describe and analyze how national development in infrastructure in Serang City. Infrastructure greatly contributes to accelerating the condition of a region. if the infrastructure is adequate, it means that the condition of the area will be good and can improve the image of the city of Serang as the province of Banten.

Keywords: Development; Infrastructure; Government.

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat vital dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Infrastruktur atau sarana dan prasarana memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Pembangunan infrastruktur di Kota Serang memiliki peran yang sangat berdampak karena berpengaruh ke semua sector, namun dalam pengamatan yang dilakukan masih banyak infrastruktur yang perlu ditingkatkan lagi karena hal itu dapat mengganggu aktifitas masyarakat, sehingga perlu untuk ditangani lebih lanjut oleh pemerintah daerah agar terus selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas infrastruktur agar bisa digunakan dengan aman. Selain itu masih ditemukan di beberapa wilayah masih terkena banjir jika curah hujan dengan intensitas tinggi. karena masih banyaknya persoalan pembangunan nasional di kota serang, maka perlu perubahan yang sangat signifikan bagi pemerintah agar sering melakukan perjalanan ke arah tersebut, dan diharapkan pemerintah dapat cepat untuk menangani bagaimana tata kelola bangunan karena masih banyak pembangunan yang masih belum selesai dalam pengerjaannya. Dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pembangunan nasional dalam infrastruktur di Kota Serang. Infrastruktur sangat memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat kondisi suatu daerah. jika infrastrukturnya memadai berarti kondisi daerah tersebut akan baik dan dapat memperbaiki citra kota serang sebagai provinsi banten

Katakunci: Pembangunan; Infrastruktur; Pemerintah.

PENDAHULUAN

Kota Serang, ibukota Provinsi Banten, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan yang maju dan modern. terbentuknya Kota Serang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, dengan tujuan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Serang pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat Namun, pembangunan di Kota Serang masih tertinggal dari kota-kota besar lainnya di Indonesia. Salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan di Kota Serang adalah infrastruktur yang belum memadai. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Kota Serang.

Namun, upaya-upaya tersebut masih belum optimal dan perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran pemerintah dalam pembangunan nasional di Kota Serang dalam konteks infrastruktur. Analisis ini penting dilakukan untuk: Memahami peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di Kota Serang.

Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis: Kebijakan dan program pemerintah: Menganalisis kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kota Serang, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan program-program sektoral. Pendanaan: Menganalisis sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Serang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Implementasi program: Menganalisis pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Serang, termasuk proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi: Menganalisis sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Partisipasi masyarakat: Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan: Pemahaman yang lebih baik mengenai peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur di Kota Serang.

Frishchmann (2006:923-928) menyatakan bahwa istilah "infrastruktur" membangkitkan pengertian sistem sumber daya fisik yang dibuat oleh manusia untuk penggunaan publik. Sumber daya infrastruktur dibagi menjadi dua yaitu "infrastruktur tradisional" dan "infrastruktur non-tradisional". Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, para ahli infrastruktur sepakat bahwa dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur, pemerintah sebagai pemain utama di sektor infrastruktur harus menjaga keberlanjutan investasi pembangunan dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Menurut Pariata Westa dalam Tuti (2003:9) mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai

pelaksanaan suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa peran adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditetapkan. Pembangunan menurut Siagian (2000:15) adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pandangan pembangunan menurut Saul M. Katz dan Tjokrowinoto (1993:8), menyatakan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional ke kondisi nasional lain yang dianggap lebih baik. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro, 2000:21). Todaro (2000:20) bahwa "Pembangunan adalah suatu proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, berbagai tanggung jawab untuk mencapainya.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk membangun dengan lebih baik, masyarakat harus lebih terdidik dan lebih bermoral. Untuk membangun dengan lebih efektif, masyarakat juga perlu belajar tentang sejarah bangsa. Mengetahui sejarah penting agar kita tidak mengulangi kesalahan bangsa lain dalam membangun dan mempertahankannya. Selain itu, pembangunan harus adil bagi manusia dan adil bagi alam yang harus dijaga kelestariannya. Selain itu, kondisi manusia dan alam harus lebih baik karena makna pembangunan adalah menjadi lebih baik dan berkelanjutan (Afiffuddin, 2010: 42-49).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai "analisis pemerintah dalam pembangunan nasional di Kota Serang dalam konteks infrastruktur". Dan deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alamiah. penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau setting alamiah secara holistik, kompleks, dan rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi pembangunan nasional dalam konteks infrastruktur di Kota Serang menunjukkan bahwa banyak pembangunan yang telah dilakukan dan terus dilakukan Wali Kota Serang menargetkan pembangunan jalan selesai 90% pada tahun 2023 Kepala Dinas PUPR Kota Serang menjelaskan bahwa pihaknya telah mencapai 85% dari target pembangunan infrastruktur dan masih ada beberapa ruas jalan yang memiliki variabel dinamis karena ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Pemerintah Kota Serang melalui Dinas PUPR akan terus melakukan pembangunan infrastruktur Kota Serang agar laju perekonomian dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

infrastruktur Kota Serang agar laju perekonomian dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Kondisi infrastruktur di Kota Serang juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa wilayah

yang belum terakses oleh jaringan jalan, meskipun berdasarkan data statistik ketersediaan sarana transportasi umum umumnya lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan sehingga daerah pinggiran dan pelosok masih mengalami kesulitan dalam ketersediaan layanan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam pembangunan nasional di Kota Serang dalam konteks infrastruktur, seperti meningkatkan anggaran infrastruktur di Kota Serang. Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan dan drainase. Namun, pemerintah Kota Serang juga memiliki kendala tersendiri, yaitu keterbatasan anggaran. Koordinasi antar instansi yang belum optimal. Masalah pembebasan lahan. Kurangnya tenaga ahli di bidang infrastruktur. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi positif dan negatif, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur di Kota Serang. Positif: Meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Meningkatkan akses terhadap pelayanan publik. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negatif Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan seperti longsor dan banjir. Berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antar lapisan masyarakat.

Selain itu, pemerintah Kota Serang harus melakukan beberapa hal untuk memperlancar pembangunan infrastruktur di Kota Serang, secara bertahap meningkatkan anggaran infrastruktur. Memperkuat koordinasi antar instansi. Mempercepat proses pembebasan lahan. Meningkatkan kualitas tenaga ahli di bidang infrastruktur. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Begitu juga dengan masyarakat dan pemerintah harus saling berkolaborasi, seperti melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan infrastruktur. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Secara umum, pembangunan nasional di Kota Serang menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti: (Peningkatan infrastruktur), jalan tol Serang-Panimbang seksi 1 & 2 telah beroperasi. Jalan raya Serang-Pandeglang telah dilebarkan. Jembatan Bojonegara telah selesai dibangun. SPAM Regional Karian telah beroperasi.

Selain itu, pemerintah Kota Serang harus melakukan beberapa hal untuk memperlancar pembangunan infrastruktur di Kota Serang, secara bertahap meningkatkan anggaran infrastruktur. Memperkuat koordinasi antar instansi. Mempercepat proses pembebasan lahan. Meningkatkan kualitas tenaga ahli di bidang infrastruktur. Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Begitu juga dengan masyarakat dan pemerintah harus saling berkolaborasi, seperti melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan infrastruktur. Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Untuk infrastruktur yang belum diperbaiki seperti jalan berlubang atau desa yang belum terakses dengan jalan yang memadai masih terkendala karena tanggung jawabnya masih berada di tangan pemerintah provinsi dan perlu menunggu kelanjutan prosesnya apakah laporannya disetujui atau tidak.

Selain itu, masih terkendala dengan anggaran yang masih minim dan dana yang diterima dari dana Instruksi Presiden (Inpres) dengan total anggaran sebesar Rp191 miliar masih akan disalurkan ke 12 item kegiatan yang sudah masuk ke dalam perencanaan pembangunan, dari hasil penelitian yang kami dapatkan setidaknya masih ada 13 titik lokasi di Kota Serang pada tahun 2024 masih dalam keadaan belum mengalami peningkatan kualitas pembangunan, dan yang menariknya beberapa lokasi tersebut masih berada di wilayah pusat Kota Serang.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah kota harus mencari cara kreatif untuk menggalang dana tambahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan bekerja sama dengan masyarakat

untuk mengadukan hal ini kepada pemerintah provinsi agar dapat menangani hal ini dengan cepat dan dengan cara ini dapat meningkatkan fasilitas berupa pelayanan kepada masyarakat karena pemerintah ini mengedepankan dan memahami kebutuhan yang lebih dibutuhkan masyarakat. Sesuai dengan arahan presiden, kepala desa harus dapat merencanakan pembangunan dengan baik dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Tidak hanya itu, perlu dipikirkan perputaran uang di desa agar dapat melaksanakan pembangunan desa dengan maksimal, salah satu strateginya adalah dengan melakukan jual beli barang di desa.

Tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan di pusat kota saja tetapi juga perlu memperhatikan jalan-jalan di perkampungan karena sudah jelas pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang besar saja tetapi jalan di perkampungan juga perlu diperbaiki dan difasilitasi agar dapat meningkatkan produktifitas masyarakatnya dan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah kota. dan kemajuan infrastruktur di kota Serang agar dapat dirasakan langsung oleh semua wilayah terutama jalan pedestrian yang digunakan oleh para pejalan kaki dan juga taman-taman kecil yang dibangun agar terasa sejuk dan nyaman.

Selain masalah jalan kampung, pemerintah juga perlu menangani kawasan kumuh seperti yang ada di Desa Pageragung, Kecamatan Walantaka dan Desa Tembung, Kecamatan Cipocok Jaya, di Desa Dukuh, Desa Pamong, Desa Sukajadi yang ada di Kecamatan Kragilan. Dan di Banten, luas kawasan kumuh mencapai 109,42 ha. dan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota karena masih terkendala pembebasan lahan dan beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah kota Serang adalah membangun bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau/ruang publik, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya. selain itu, pemerintah pusat berencana akan memberikan 2200 SR (Sambungan Rumah) nantinya yang akan digunakan sebagai tempat untuk merelokasi warga yang terkena dampaknya.

Selain itu persoalan banjir di Kota Serang diperlukan kerjasama yang di bangun, baik dari pemerintah maupun masyarakat. untuk menindak lanjuti dan Pj Walikota Serang Yedi Rahmat mengatakan, akan melakukan pembongkaran di sejumlah titik yang mengalami penyempitan sepadan sungai di hulu sampai hilir. Karena penyebab banjir yang sering terjadi di Kabupaten Serang adalah karena sungai Cibanten mengalami penyempitan yang mengakibatkan tidak mampu menahan debit air dari waduk Sindang Heula, daya tampung sungai yang kurang memadai sehingga menerjang permukiman warga serta lahan sawah, danau dan bendungan yang terbatas

Dalam penelusuran di lapangan ditemukan bahwa penyebab lain banjir di kota Serang diakibatkan oleh sampah dan drainase yang buruk karena tertutup bangunan. bangunan yang liar dapat menghambat aliran air yang seharusnya mengalir bebas di sepanjang sungai. Dalam situasi hujan lebat atau curah hujan yang tinggi, aliran air menjadi semakin deras dan dapat membanjiri area di sekitarnya. Jika aliran air sudah terhambat oleh bangunan liar, maka kemungkinan banjir akan semakin besar. kendaraan yang membawa muatan barang yang melebihi batas maksimum jalan yang ditentukan

Ombudsman menyatakab masih terdapat 15 kawasan pemukiman rawan banjir dengan total 5.570 m2 dari 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Serang, Kasemen, dan Cipocok Jaya. Dan banjir sudah seperti kegiatan wajib tiap tahun ketika hujan deras mengguyur. Karena hal itu, Ombudsman pun memberikan beberapa saran kepada PJ Walikota Serang terkait penyelesaian masalah banjir, yaitu segera melakukan koordinasi dengan berbagai OPD terkait hal lain yang perlu dilakukan. karena pemerintah cenderung

belum dapat membedakan “bencana banjir” dengan “kejadian banjir” sehingga mereka masih berorientasi pada kejadian sedangkan dampak banjirnya belum menjadi prioritas untuk mereka. Sedangkan dampak banjir lebih menjadi fokus dalam upaya penanggulangan banjir itu sendiri sehingga kerugian yang ditimbulkan akan bisa lebih diminimalkan. perlu dilakukan adanya Pemeliharaan Jalan, yaitu kegiatan penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. perbaikan infrastuktur jalan kota serang yang rusak dengan anggaran setiap tahun dengan rentang dana sebanyak Rp.41,5-Rp.51,5 milyar ini sangatlah lamban dalam pengimplementasiannya. Ada jarak antara kualitas jalan dengan anggaran yang dimiliki, kekeliruan implementasi dana anggaran jalan yang membuat jalan rusak semakin menghambat aktifitas masyarakat. Karna kualitas jalan harus lebih baik agar bisa dinikmati lagi. Anggaran yang sudah ada harus dipakai dengan semaksimal mungkin. Ada prediksi dan target yang memang harus dicapai. Karena apabila pemenuhan akses publik seperti perbaikan infrastruktur tidak dilakukan maka pemerintah telah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 203 mengenai Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Data yang ditemukan bahwa sebagian besar daerah rawan banjir di Kabupaten Serang berada di kelas sedang sampai tinggi. Di bagian barat daerah yang terlihat rawan terdampak banjir adalah di sebagian besar kecamatan Padarincang bagian utara, sebagian kecil kecamatan Cinangka bagian timur dan Gunungsari bagian barat. Terdapat juga daerah rawan banjir tingkat sedang di sebagian besar kecamatan Kramatwatu dan Bojonegara. Kecamatan Puloampel juga rawan banjir tingkat sedang pada bagian pantai. Sedangkan pada Kabupaten Serang bagian timur terlihat sebagian besar kecamatan di utara merupakan daerah rawan banjir tingkat sedang. Lalu untuk sisi selatan kabupaten Serang bagian timur sebagian kecamatan rawan banjir dengan tingkat bahaya tinggi seperti pada kecamatan Pamarayan, Tunjung Teja, Cikeusal, Kopo, Kibin dan sebagian timur kecamatan Cikande. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada kelas banjir tinggi dan sedang terdapat daerah industry yaitu di Cikande dan juga Bojonegoro dan Puloampel tentu saja jika terjadi banjir akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Tabel 1. Perkembangan Kondisi Banjir di Kota Serang, Tahun 2024

Kecamatan ↑↓	Banjir		
	2020 ↑↓	2021 ↑↓	2023 ↑↓
Kota Serang	42	33	28
Curug	1	-	-
Walantaka	1	1	-
Cipocok jaya	10	3	-
Serang	17	14	20
Taktakan	-	4	-
Kasemen	13	11	8

Sumber: BPS, Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) kota Serang, masih terdapat tiga kecamatan di kota Serang yang masih mengalami peningkatan kejadian banjir namun empat kecamatan lainnya sudah tidak mengalami banjir.

Namun masalah kewenangan masih menjadi kendala bagi pemerintah kota Serang untuk segera melakukan tindakan karena perlu diketahui pemilik jalan ini oleh pusat atau daerah, jika jalan itu milik pemerintah pusat maka perlu koordinasi apakah penanganan akan disetujui atau tidak. Selain itu perlu melakukan pemetaan dan kajian menyeluruh terhadap titik banjir dan penyebabnya untuk menyusun langkah-langkah mitigasi yang lebih holistik dan berkelanjutan. komunikasi mendukung tercapainya pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang yang termuat dalam empat dimensi komunikasi yaitu penemuan fakta, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan.

BPBD Kabupaten Serang adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah, Lembaga atau pihak lain yang terkait dalam penanggulangan bencana dan memberikan bantuan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Kepolisian, Palang Merah Indonesia (PMI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan Umum (PU), dan Badan SAR Nasional (BASARNAS). rekapitulasi bencana banjir yang terjadi pertahun, jumlah kerusakan sarana prasarana serta korban jiwa akibat banjir pertahun dari tiap Kecamatan, tempat evakuasi sementara yang terdapat di setiap Kecamatan, dan peralatan evakuasi di setiap Kecamatan. Selain itu, penyusunan program kerja juga diperlukan untuk menemukan fakta yang ada ditempat kejadian.

Semua hal diatas diperlukan kesadaran masyarakat agar peduli kepada lingkungan sekitar untuk dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. kepekaan masyarakat kota Serang sangat dibutuhkan atas fasilitas infrastruktur dan dianggap masalah yang serius, karena masyarakat kota Serang lebih mengedepankan aspek rohani, daripada aspek jasmani, yang memang realitanya aspek jasmanilah yang saat ini paling berpengaruh atas kehidupan mendatang. Untuk itu, perlu paradigma baru yang disebut sebagai pembangunan partisipatoris yang mengindikasikan dua perspektif. Pertama, pelibatan masyarakat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai-nilai pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Kedua, membuat umpan balik atau feedback yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Setiap masyarakat mempunyai kepentingan tersendiri, namun dalam menghadapi masalah infrastruktur pasti mempunyai kepentingan masyarakat yang sama, yaitu sebagai pengguna jalan.

KESIMPULAN

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan infrastruktur merupakan pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat sebagai salah satu unsur pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan, seperti infrastruktur jalan dan jembatan. Terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan telah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan dan jembatan.

pemerintah mempunyai kelemahan dalam mendistribusikan anggaran perbaikan jalan, sementara masyarakat masih stagnan dalam mempertahankan perhatiannya pada urusan akhirat dan membenarkan kebiasaan buruk dengan memberikan pemakluman atas perbuatan pemerintah kota Serang

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 71–79. <https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133>
- Alwan, N., Saepudin, E. A., Sari, M. K., Pajar, N. P., & Purwasih, R. (2024). Analisis Rekonstruksi Organisasi dan Politik Pembangunan di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 234–241. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1457>
- Amalia, Dyah. (2019). “Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Tertumbuhan Ekonomi (Studi Pada 33 Provinsi Di Indonesia Tahun 2008–2017).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1–13.
- Asariansyah, Muhammad Faisal, Choirul Saleh, and Stefanus Pani Rengu. (2013). “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(6):1141–50.
- Ferlita, S., Saepudin, E. A., Maharani, P. S., Kurniawan, I. P., Susilawati, S., & Al Fauzan, R. Z. (2024). Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 189–195. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1417>
- Fitrianti, Anisa Ana, Ach. Apriyanto Romadhan, and Salahudin. (2022). “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6(1):47–64. doi: 10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64.
- Husen, Amran, and Aisyah S. Baranyanan. (2021). “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan Dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara.” *Jurnal Poros Ekonomi* 10(1):20–34.
- Keusuma, Suriani dan Cut Nanda. (2015). “PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Suriani Dan Cut Nanda Keusuma.” *Jurnal Ecosains* 4:1–18.
- Kogoya, Teraik, Benu Olfie, and Esry Laoh. (2015). “Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(2):1–14.
- Kurniawati, Sri, and Asyurrahman. (2018). “Pembangunan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat.” *Prosiding SATIESP* 127–43.
- Maimunah, Siti. (2010). “Peranan Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian Regional Di Indonesia.” *Warta Penelitian Perhubungan* 22(2):113–33. doi: 10.25104/warlit.v22i2.1030.
- Posumah, Ferdy. (2015). “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien* 15(2):1–13.
- Pratiwi, A., Saipudin, E. A., Hotimah, N., Maulidah, S., & Yuliyani. (2024). Analisis dalam Merancang Konsep Ekonomi Kebijakan: kebijakan Ekonomi. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in*

- Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 179–183.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1306>
- Sufriadi, D. (2018). Analisis transformasi struktural perekonomian Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 3(2).
- Sukwika, Tatan. (2018). “Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 6(2):115. doi: 10.14710/jwl.6.2.115-130.
- Vina Maria Ompusunggu. (2019). “Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Wunas, Shirly, and Venny Veronica Natalia. (2015). “Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Kota Makassar.” *Jurnal Transportasi* 15(3):169–78.